

TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008

(Studi Deskriptif Tanggapan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tentang
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008)

Noneng Sumiaty

Peneliti Madya Pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung
Jl. Pajajaran No. 88 Bandung - 40173

Risa Sunarsi

Peneliti Muda Pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung
Jl. Pajajaran No. 88 Bandung - 40173

(Makalah diterima tanggal 19 Oktober 2011 - Revisi tanggal 4 November 2011)

Abstrak

Tanggapan masyarakat terhadap UU ITE berbeda-beda, tergantung dari: pengetahuan dan pemahaman, sikap serta motivasinya. Hal ini memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan UU ITE, karena memengaruhi efektivitas dari undang-undang itu sendiri. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sedangkan lokasi penelitian di 14 daerah Kab./Kota yang ada di Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar telah mengetahui adanya UU ITE, namun sebagian besar dari responden tidak memahami. Sikap responden terhadap UU ITE, sebagian besar menerima kehadiran UU itu. Sementara motivasi masyarakat mengetahui UU ITE karena senang berinternet dan merasa perlu mengetahui dan memahaminya sehingga mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang UU ITE. Karena itu disarankan agar Pemerintah Daerah atau Dinas terkait segera melaksanakan penyebaran informasi tentang UU ITE dengan berbagai cara: seperti melalui media cetak, elektronik dan tatap muka, serta bisa melalui sosialisasi. Kepada para pengguna dan pengelola internet diharapkan mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan UU ITE. Serta kepada para Penggagas amandemen UU ITE diharapkan mampu mengamandemen sesuai dengan tuntutan semua pihak.

Kata Kunci : Tanggapan, Masyarakat, UU ITE

Abstract

Public response of UU ITE are different, depend on knowledge, understanding, attitude and motivation. This play important role in implementation process and effectivity of UU ITE itself. This research use quantitative descriptive method. This research is conduct in 14 Regency/City in West Java and Banten Province. The result showed that public have already know the existence of UU ITE, but the majority of them don't understand about UU ITE. The attitude of respondent on UU ITE that the majority accept the presence of UU ITE. While the motivation of public know of UU ITE because they like to use internet and they feel important to know and understand, so that they know what is prohibited and what is allowed by UU ITE. Therefore its recommended that Regional Government or official agencies disseminate information about UU ITE immediately through different ways such as: printed media, electronic, face to face, and socialization. To internet users and internet administrator/provider are expected to understand

of its right and obligation based on UU ITE. Hopefully, the originator can amend UU ITE based on demand of all parties.

Keyword: response, public, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat dan sudah merupakan bagian dari kebutuhan manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi berada pada posisi yang sangat strategis, yaitu dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan serta peradaban manusia, namun di sisi lain teknologi informasi berpeluang untuk disalahgunakan sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum atau kejahatan-kejahatan baru.

Undang-undang yang dikeluarkan oleh negara dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat beserta Pemerintah, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, seperti pengesahan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008.

Dalam kenyataannya undang-undang tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Segera setelah UU ITE ditetapkan DPR dan diwartakan kepada publik, muncul beragam pendapat atas UU ITE. Pihak yang pro atau mendukung undang-undang itu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas hadirnya UU ITE yang menjadi *Cyber law* pertama di Indonesia.

Sementara beberapa pihak yang kontra, selalu menjadikan hak azasi manusia sebagai argumen bahwa UU ITE bertentangan dengan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). UU ITE juga dianggap membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara mengeluarkan pendapat.

Sehubungan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyarankan agar Undang-Undang ITE ditelaah lagi. Ia meminta agar

bagian yang kurang dari undang-undang ini dikoreksi. (<http://bataviase.co.id>)

Kebijakan tentang undang-undang ITE yang awalnya bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi tampaknya cenderung menimbulkan konflik di masyarakat termasuk para pengguna internet. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan amandemen atas UU ITE tersebut.

tanggapan masyarakat baik yang di warnet-warnet maupun di tempat lain yang berbeda usia, pekerjaan, jenis kelamin dan status perkawinan, memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan UU ITE, karena hal ini memengaruhi efektivitas dari undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Sejuahmana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU ITE? Sejuahmana sikap masyarakat terhadap UU ITE? Sejuahmana motivasi masyarakat terhadap UU ITE?

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU ITE, mengetahui sikap masyarakat terhadap UU ITE, dan mengetahui motivasi masyarakat terhadap UU ITE.

LANDASAN KONSEP

Tanggapan

Tanggapan dapat diartikan sebagai gambaran dari sesuatu pengamatan, atau menurut Bigot et.al. (1950: 72) Tanggapan adalah suatu bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Tanggapan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan;
- 2) Tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasi; dan
- 3) Tanggapan masa kini atau tanggapan representatif (tanggapan mengimajinasikan).

Pada proses persepsi setiap stimulus yang datang akan membentuk gambaran dalam jiwa yang tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai dilakukan, namun disimpan dalam jiwa individu yang nantinya akan dapat dibayangkan dan ditanggapi kembali. Fungsi inilah yang dalam psikologi disebut sebagai fungsi tanggapan yang didefinisikan sebagai gambaran ingatan dalam jiwa manusia yang terjadi setelah objek yang diamati sudah tidak berada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan. (<http://radit010392.blogspot.com/2009/12/arti-tanggapan.html>)

Sementara Conyers (1991: 153) lebih mempertegas kembali tentang batasan pengertian tanggapan. Tanggapan adalah sikap, perasaan, dan ungkapan pendapat masyarakat mengenai kebijakan baik itu dalam perencanaan pembangunan maupun dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, tanggapan dalam penelitian ini merupakan penilaian terhadap suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini UU ITE berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, sikap, dan motivasi yang ada pada diri individu.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojo, 2003).

Terdapat 6 (enam) tingkatan pengetahuan yang termasuk dalam domain kognitif, yaitu: (Notoatmojo, 2003)

a) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang

paling rendah.

b) Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dsb.

c) Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitan satu sama lain.

e) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merujuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Sikap

Istilah sikap (*attitude*) digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer untuk menunjukkan suatu status mental seseorang. Sikap dapat memberikan gambaran perilaku (tingkah laku) komunikasi sebelum dan sesudah menerima informasi. (Sunaryo, 1977: 100, dalam tesis Tristiana, 2009, Unpad)

Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Sikap

1. Pengalaman pribadi

Apa yang sedang terjadi dan sedang dialami akan ikut membentuk dan memengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek

psikologis.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting.

Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang biasanya dianggap penting bagi individu.

3. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap seseorang. Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap seseorang terhadap berbagai masalah.

4. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, media massa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Tugas pokoknya dalam penyampaian informasi telah mengondisikan media massa menyajikan pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang.

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga ini mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam individu.

6. Pengaruh faktor emosional

Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama (Azwar, 2003: 30-36)

Komponen sikap

1. Kognitif

Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang

benar bagi objek sikap. Sering kali apa yang dipercaya seseorang itu merupakan *stereotype* atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Kepercayaan datang dari apa yang telah dilihat atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. (Azwar, 2003: 25)

2. Afektif

Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Pada umumnya, reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud (Azwar, 2003: 27)

3. Behavior (konatif)

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. (Azwar, 2003: 27)

Pandangan psikologi kognitif didasari atas reaksi terhadap pandangan behaviorisme. Pandangan psikologi kognitif didasarkan pada asumsi bahwa: hanya dengan mempelajari proses mental kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh suatu organisme. Kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spesifik, sama seperti yang dilakukan oleh ahli perilaku, tetapi menginterpretasikannya dalam kaitan proses mental dasar.

Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. (KBBI, 1996). Sedangkan motif adalah alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu.

Dalam Cambell (1994), Schutz

berbicara tentang motif “supaya” dan motif “karena” (Basrowi & Sudikin, 2002: 41-42). Motif “supaya” adalah motif yang menggambarkan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Motif tersebut biasanya digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, dan minat yang diinginkan aktor dan oleh karena itu berorientasi pada masa depan.

Sedangkan motif “karena” merujuk kepada pengalaman masa lalu aktor yang tertanam dalam pengetahuannya yang terendapkan, dan oleh karena berorientasi kepada masa lalu, sehingga motif “karena” ini lazim disebut alasan atau sebab.

Motif sekarang, peneliti kategorikan sebagai motif yang timbul bukan karena alasan masa lalu, ataupun tidak berkaitan dengan masa depan. Motif sekarang peneliti kategorikan sebagai motif yang diperlukan pada saat ini, pada saat penelitian dilakukan.

Faktor Eksternal Penarik Perhatian. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian (*attention getter*). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan.

Faktor Internal Pengaruh Perhatian, adanya perbedaan perhatian karena timbul dari faktor-faktor internal dalam diri kita. Contohnya: faktor-faktor biologis, faktor-faktor sosiopsikologis, dan motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan, memengaruhi apa yang kita perhatikan.

Beberapa teori tentang motivasi, antara lain :

1. Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan)

Pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: (1) kebutuhan fisiologikal (*physiological needs*), seperti: rasa lapar, haus, istirahat dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (*safety needs*), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*); (4) kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (*self actualization*), dalam arti

tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

2. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”)

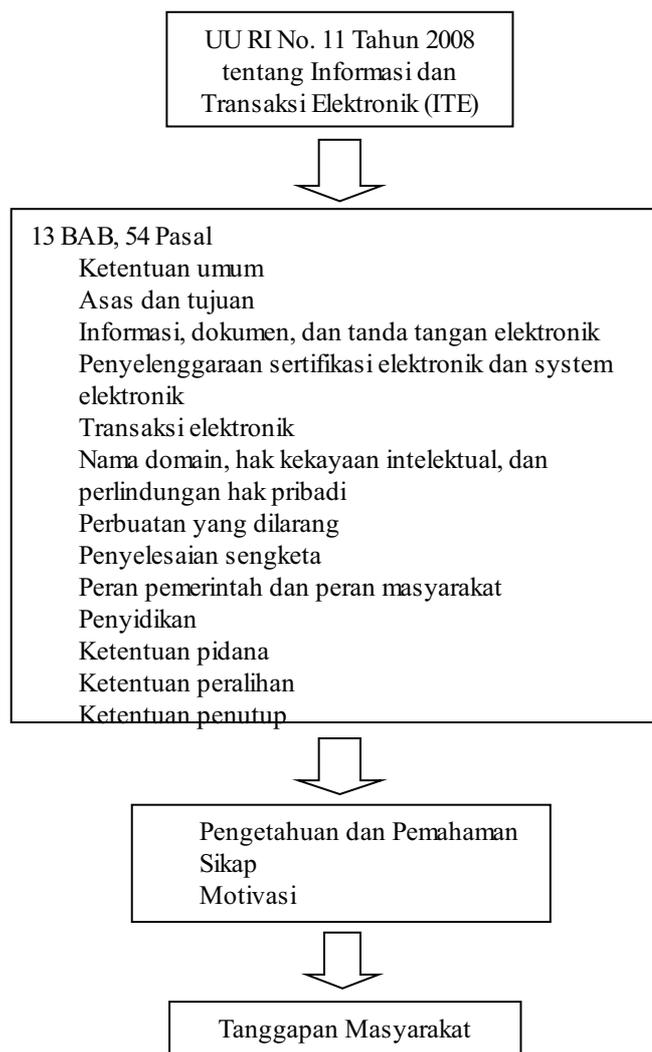
Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG”. Akronim “ERG” dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah, yaitu: E = *Existence* (kebutuhan akan eksistensi), R = *Relatedness* (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G = *Growth* (kebutuhan akan pertumbuhan).

Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. *Pertama*, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena “*Existence*” dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow; “*Relatedness*” senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan “*Growth*” mengandung makna sama dengan “*self actualization*” menurut Maslow. *Kedua*, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa:

- a. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya;
- b. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan;
- c. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar.

Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi obyektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sekilas Tentang UU ITE

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang akan mengatur bagaimana masyarakat

menggunakan teknologi informasi tersebut secara bijak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, mulai disusun sejak tahun 2003, dan secara bertahap dibahas pada tahun 2006-2007, disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008, dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2008.

UU ITE ini terdiri atas 13 Bab dan 54 pasal memiliki cakupan materi yang cukup luas, di antaranya adalah: *extraterritorial jurisdiction*, asas netral teknologi, pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik (*certification authority*), penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, perlindungan hak pribadi, dan perbuatan yang

dilarang serta ketentuan pidananya.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*Electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif, tipe penelitian yang digunakan deskriptif. Sedangkan teknik penelitian dilakukan secara acak sederhana.

Lokasi penelitian, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian: angket, dokumentasi, wawancara.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah berumur minimal 17 tahun, dan telah mengetahui UU ITE (UU Nomor 11/2008) di wilayah kerja BPPKI Bandung, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Sampel responden di tiap-tiap lokasi Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 20 responden yang dipilih secara acak dari satu Kecamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Jenis kelamin responden, sebagian besar laki laki sebanyak 173 responden

(61,8%) dan perempuan sebanyak 107 responden (38,2%). Sebagian besar responden pengunjung warnet adalah laki-laki. Setelah angket diperiksa dan dianalisis ternyata laki-laki yang lebih banyak menjadi responden.

Jika dilihat dari kelompok usia responden, didominasi kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia antara 17-41 tahun. Di antara kelompok usia yang ada kelompok usia antara 17-21 tahun merupakan yang terbanyak, yakni 87 responden (31,1%). Hal ini wajar karena yang menjadi responden adalah masyarakat yang telah mengetahui UU ITE, juga masyarakat yang sering menggunakan internet di warnet kebanyakan kaum muda, yaitu pelajar atau mahasiswa.

Namun apabila dilihat dari mata pencaharian responden, sebagian besar merupakan pelajar/mahasiswa sebesar 103 responden (36,8%), disusul PNS sebanyak 91 responden (32,5%), dan Pegawai Swasta sebanyak 56 responden (20%). Hal ini terjadi karena yang menjadi sasaran responden adalah masyarakat yang telah mengetahui UU ITE. Setelah turun ke lokasi penelitian ternyata mereka yang menjadi responden adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, PNS dan Pegawai Swasta.

Untuk status perkawinan responden, frekuensinya seimbang antara yang menyatakan belum/tidak menikah dengan yang menyatakan menikah masing-masing sebanyak 140 responden (50%) dan 137 responden (48,9%). Ini sesuai dengan latar belakang mata pencaharian responden yang sebagian besar adalah mahasiswa/pelajar yang menyatakan tidak/belum menikah, sedangkan yang menyatakan telah menikah, mereka berasal dari kalangan yang bermata-pencaharian PNS dan Pegawai Swasta.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang UU ITE

Sebagian besar responden telah mengetahui kepanjangan dari singkatan UU ITE. Namun masih ada yang belum mengetahui, bahkan ada yang tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar istilah UU ITE.

Media yang menjadi sumber

pengetahuan responden untuk mengetahui UU ITE, seperti dikemukakan oleh responden, yaitu televisi 166 responden (59,3%), surat kabar 89 responden (31,8%), radio 6 responden (2,1%) dan teman 19 responden (6,8%).

Berbagai cara dilakukan oleh responden untuk lebih mengetahui atau mendalami tentang UU ITE. Sebagian besar mencari bahan lewat internet, ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena yang menjadi sasaran adalah masyarakat pengguna internet. Jelas mereka mencari bahan tentang UU ITE melalui internet pula.

Cara responden yang lain adalah mengikuti sosialisasi, memperhatikan perkembangan lewat media massa dan membaca lewat media cetak dan buku.

Pemahaman responden terhadap UU ITE berdasarkan hasil penelitian adalah memahami 71 responden (25,4%), belum memahami 197 responden (70,4), tidak memahami 12 responden (4,3%). Dari data tersebut, disimpulkan bahwa pemahaman responden tentang UU ITE masih rendah, yaitu hanya 71 responden yang telah memahaminya. Sementara yang belum memahami masih banyak dan masih ada yang tidak memahami.

Sikap

Istilah sikap (*attitude*) digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer untuk menunjukkan suatu status mental seseorang. Bagi para ahli komunikasi, sikap dapat memberikan gambaran perilaku (tingkah laku) komunikan sebelum dan sesudah menerima informasi. (Sunaryo, 1977: 100, dalam tesis Tristania, 2009, Unpad)

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan rangsangan yang relevan, dengan orang-orang, atau kejadian-kejadian. Sikap bisa berisi *cognitive* (kognitif) dan *affective* (afektif). Komponen kognitif dari sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya obyek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan afektif menyangkut perasaan-perasaan tertentu, misalnya ketakutan, kedengkian, simpati,

antipati, dan sebagainya. Di bawah ini akan disajikan beberapa sikap responden terhadap pemberlakuan UU ITE.

Dari hasil data masuk, yaitu dari kuesioner yang disampaikan ke responden, diketahui sebagian besar responden menyatakan menerima terhadap UU ITE, hanya ada 17 responden yang tidak menerima lahir dan berlakunya UU tersebut. Setelah diketahui bahwa sebanyak 263 responden telah menerima terhadap UU ITE, selanjutnya diketahui juga bahwa penerimaan responden itu bervariasi; antara lain menyatakan menerima seluruh bagian dari UU ITE. Sebagian lagi menyatakan hanya menerima sebagian dari UU itu. Sedangkan sisanya menyatakan menerima pasal-pasal tertentu saja.

Berbagai alasan ke 17 responden tidak menerima lahirnya UU ITE. Di sana terlihat jelas bahwa responden yang tidak menerima karena beralasan UU itu belum waktunya untuk diberlakukan. Yang beralasan tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa kita dan isinya terlalu luas, dan sisanya menyatakan sudah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.

Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. (KBBI, 1996). Sedangkan motif adalah alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu.

Berbagai alasan dikemukakan oleh responden untuk mengetahui UU ITE, sebagian besar responden sebanyak 206 orang menyatakan supaya mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh UU ITE. Sisanya menyatakan supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagian lagi menyatakan supaya mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan supaya bisa menjelaskan kepada yang lain.

Hambatan Responden Dalam Memahami UU ITE

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan UU ITE. Ternyata lebih dari

setengahnya responden, berpendapat kurangnya sosialisasi, selanjutnya yang berpendapat karena pendidikan masyarakat yang masih rendah dan yang berpendapat masih adanya tanggapan yang berbeda-beda dikemukakan serta ada yang menjawab karena adanya tumpang tindih antara UU ITE dengan UU yang lainnya.

Sejak diberlakukannya UU ITE selalu ada perbedaan pendapat di antara para pengamat hukum, pengamat media, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Sebagian besar responden menyatakan karena luasnya cakupan isi UU ITE, dan karena adanya tumpang tindih dari isi beberapa pasal dalam UU ITE. Serta karena adanya pasal yang memberatkan, dan karena ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan semangat tujuan pembentukan UU ITE.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan dan pemahaman responden tentang UU ITE ternyata masih rendah. Hal ini terlihat dari :
 - Masih ada sebagian responden yang tidak mengetahui kepanjangan dari UU ITE, sehingga responden mencari bahan UU ITE lewat internet.
 - Responden mengikuti sosialisasi, memperhatikan perkembangan lewat media massa, dan membaca lewat media, cetak dan buku.
 - Namun hanya sebagian kecil responden yang telah mengikuti sosialisasi. Ini terbukti dari sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta jajarannya dirasakan sangat kurang pengunjungannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan petugas penelitian dengan pejabat di daerah penelitian atau yang berkompeten mewakilinya.
 - Sebagian besar responden mengatakan UU ITE sulit dipahami karena luasnya cakupan UU ITE, dan hanya sebagian kecil responden yang memahaminya itupun hanya beberapa pasal UU ITE.
2. Sikap responden terhadap UU ITE:
 - Sebagian besar responden menerima kehadiran UU ITE, hanya sebagian kecil dari responden yang tidak menerima lahirnya UU ITE.
 - Sebagian besar responden menyatakan menerima seluruh bagian dari UU ITE. Sebagian lagi menyatakan hanya menerima sebagian dari UU itu. Sedangkan sisanya menyatakan menerima pasal-pasal tertentu saja.
 - Masih ada responden yang tidak menerima berlakunya UU ITE.
 - Responden yang tidak menerima UU ITE karena beralasan UU itu belum waktunya untuk diberlakukan, tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa kita dan isinya terlalu luas, dan menyatakan sudah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.
 - Pendapat responden tentang tiga bagian utama dari isi UU ITE yaitu :
 - Ketentuan umum, Azas Tujuan, serta Peran Pemerintah & Peran Masyarakat
 - Penyelenggara Sertifikasi Elektronik & sistem Elektronik, Peran Pemerintah & Peran Masyarakat, serta Ketentuan Pidana
 - Transaksi Elektronik, Nama Domain, dan Ketentuan Pidana.
 - Pendapat responden. Tentang ada tidaknya perbedaan frekuensi mengakses internet sebelum dan sesudah berlakunya UU ITE; berbeda-beda.
3. Motivasi responden tentang UU ITE bermacam-macam, antara lain:
 - Sebagian besar responden menyatakan alasan mereka mengetahui atau mempelajari UU ITE supaya mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh UU ITE, supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan supaya bisa menjelaskan kepada yang lain.
 - Hal yang mendorong responden untuk mengetahui UU ITE, karena senang berinternet sehingga merasa perlu mengetahuinya, tuntutan zaman di era reformasi ini, tuntutan pekerjaan, dan karena ikut-ikutan saja.

Dari kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait segera melaksanakan penyebaran informasi mengenai UU ITE tersebut. Penyebaran informasi bisa melalui berbagai cara, antara lain melalui berbagai media informasi seperti: media cetak dan elektronik atau media tatap muka, juga bisa melalui sosialisasi.
2. Diharapkan agar UU ITE diterima semua masyarakat, segera direvisi atau diamandemen. Sebagian besar responden, setuju akan dilaksanakan amandemen terhadap UU ITE.
3. Kepada Para Penggagas dan Legislator atau Pemerintah yang akan membahas amandemen UU ITE diharapkan mampu memperjuangkan hal-hal yang bisa membuat semua masyarakat terlindungi dari penggunaan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saefudin. 2003. *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendikia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mar'at. 1981. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Edisi : Best Seller. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sumber lainnya :**
- Tesis :**
- Tristania R. A. P. 2009. *Pengaruh Perbedaan Warna dan Media Komunikasi Dalam Penyampaian UU ITE Terhadap Kognisi Mahasiswa*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Peraturan :**
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Internet :**
- Pelaksanaan Undang-Undang ITE Tak Menyentuh Keadilan*, diakses melalui: <http://hahn.web.id/?p=20>, 8/2/2011.
- Teori-Teori Motivasi*. Diakses melalui: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/> 2/3/2011.